



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 188.45-401.204/ 32 /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2025-2026

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” merupakan indikator kinerja tujuan yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang ditugaskan.
- KETIGA : Untuk mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Februari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Segenap Penanggung Jawab
Indikator dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR : 188.45-401.204/ 32 /2024
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PEMERINTAH KOTA MADIUN
 TAHUN 2025-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PENGHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital	Pertumbuhan Ekonomi	Indikator yang menggambarkan peningkatan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa pada suatu wilayah: dengan rumus perhitungan: $R(t-1, t) = (PDRB_t - PDRB_{t-1})/PDRB_{t-1} \times 100\%$, dimana R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen (%); PDRB _t = Produk Domestik Regional Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t; PDB _{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Pusat Statistik
		Indeks Gini	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$ Keterangan: GR = <i>Gini Ratio</i> F _i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i Y _i = jumlah komulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i Nilai GR terletak antara nol (0) sampai dengan satu (1)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pusat Statistik
2.	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Penghitungan rata-rata ukur geometrik berdasarkan indeks dari dimensinya yang mencakup: 1. Kesehatan 2. Pendidikan dan 3. Pengeluaran	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Pusat Statistik

1	2	3	4	5	6
		Indeks Pembangunan Gender	Indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara: indeks pembangunan manusia perempuan dengan indeks pembangunan manusia laki-laki. (indeks pembangunan manusia perempuan di bagi indeks pembangunan manusia laki-laki)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pusat Statistik
3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis <i>Smart City</i> dan Percepatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

WALI KOTA MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI S.H., M.M., M.Pd.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR : 188.45-401.204/ 32 /2024
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PEMERINTAH KOTA MADIUN
 TAHUN 2025-2026

INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2025-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PENGHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Potensial	Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan	Hasil laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, pada komponen perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor.	Dinas Perdagangan	Badan Pusat Statistik
		Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pariwisata	Hasil laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, pada komponen pendukung kepariwisataan.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Badan Pusat Statistik
2	Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif	Indeks Ketenteraman	Hasil survei untuk mengukur seberapa tenteram dan tertib Kota Madiun menurut persepsi masyarakat yang di ukur dalam 4 (empat) dimensi: 1. Persepsi Aman 2. Persepsi Suasana Tenang 3. Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan 4. Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang Berlaku dan Norma-norma yang ada (Ketertiban Umum)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Rumus penghitungan menggunakan data yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, Modul Konsumsi dan Pengeluaran periode Maret dan September yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pusat Statistik

1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik
5	Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Survei yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengukur Tingkat kegemaran membaca Masyarakat: Rumus: $TGM = (0,3FM+0,3DM+0,3JB) + (0,05FAI+0,05DAI)$ Ket. FM = Frekuensi Membaca DM = Durasi Membaca JB = Jumlah Buku FAI = Frekuensi Akses Internet DAI = Durasi Akses Internet	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Provinsi Jawa Timur
6	Menguatnya Karakteristik Masyarakat	Indeks Kerukunan	Hasil Survei untuk mengukur seberapa Rukun Umat Beragama penduduk Kota Madiun menurut persepsi masyarakat yang diukur dalam 5 (lima) dimensi: 1. Persepsi Menghormati 2. Persepsi Menerima 3. Persepsi Jujur 4. Persepsi Teladan 5. Persepsi Kesetaraan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Meningkatnya Standar Kompetensi Kelulusan	Kompetensi Kelulusan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Lulusan pada tahun berjalan yang sesuai Standar Kompetensi Kelulusan yang sudah ditetapkan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Hidup yang bisa dijalani oleh seseorang yang lahir pada periode tersebut atau perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pusat Statistik
		Menurunnya Prevelensi <i>Stunting</i>	Jumlah balita dalam suatu populasi yang mengalami <i>stunting</i> dalam pertumbuhan fisiknya, dalam hal ini juga digunakan untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi	Rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat pada suatu wilayah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Badan Pusat Statistik
		Persentase Angka Kecukupan Protein	Rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat pada suatu wilayah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Badan Pusat Statistik
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks pencemaran air dikali 30% + Indeks pencemaran udara dikali 30% + Indeks tutupan lahan di kali 40%	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama periode 1 bulan, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Pusat Statistik
12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Pendapatan yang diterima rata-rata per orang di suatu wilayah, perhitungan tersebut digunakan untuk mengevaluasi standar dan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Pusat Statistik

1	2	3	4	5	6
13	Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok	Tingkat Inflasi	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Badan Pusat Statistik
14	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, jika semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pusat Statistik
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun	Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Madiun	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kementerian Dalam Negeri
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	Pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pemeriksa Keuangan
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Predikat yang diberikan kepada kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang telah mencanangkan Zona Integritas dengan mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi wilayah bebas dari korupsi	Inspektorat	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1	2	3	4	5	6
17	Meningkatnya Kualitas <i>E-Government</i>	Indeks Pemerintahan Sistem Berbasis Elektronik	Hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap proses pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (<i>maturity level</i>).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
18	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Inovasi Pemerintah Daerah Oleh Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
19	Penyelenggaraan <i>Smart City</i>	Persentase Program <i>Smart City</i> yang tercapai	Tercapainya program yang diinisiasi untuk mendukung <i>smart city</i> dalam upaya mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari bertujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI S.H., M.M., M.Pd.